

ORASI ILMIAH

KONFLIK, MEDIASI, DAN TRANSFORMASI
Wacana Kearifan Lokal Manajemen Konflik Minangkabau

LUSTRUM KE-6
07 MARET 1982 - 07 MARET 2012
FAKULTAS ILMU BUDAYA



Oleh Hasanuddin

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2012

KONFLIK, MEDIASI, DAN TRANSFORMASI

Wacana Kearifan Lokal Manajemen Konflik Minangkabau¹

Oleh Hasanuddin
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Assalamualaikum wr wb
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Rektor beserta jajaran pimpinan Univ. Andalas,
Ykh. Ketua dan Anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Univ.
Andalas,
Yang Kami banggakan Civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya
Univ. Andalas
Para undangan dan Hadirin yang tidak dapat kami sebutkan
satu perasatu, yang kami muliakan.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita kembalikan kepada Dzat yang berhak menerimanya, yakni Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya hari ini kita dapat merayakan Lustrum ke-6, atau Hari Ulang Tahun ke 30 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada arwah Nabi Muhammad Saw, pembawa risalah kebenaran spiritual yang sejalan dengan kebenaran intelektual dan emosional.

¹ Makalah ini disampaikan sebagai Orasi Ilmiah dalam Lustrum Ke-6 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, pada 7 Maret 2012 di Limau Manih, Padang.

Pendahuluan

Hadirin yang mulia

Sebuah kehormatan yang besar saya diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Bapak/ Ibu/ Sdr sekalian pada Lustrum ke-6 FIB Universitas Andalas (1982-2012) ini. Orasi ini berjudul: **KONFLIK, MEDIASI, DAN TRANSFORMASI, Wacana Kearifan Lokal Manajemen Konflik Minangkabau**. Judul tersebut diilhami oleh realitas aktual bangsa Indonesia akhir-akhir ini dan hasil penelitian kami atasnya dalam perspektif wacana budaya. Di samping itu, hal itu menunjukkan semangat penggalian dan revitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) dalam upaya mengembangkan karakter bangsa: sebuah wacana yang marak didengungkan akhir-akhir ini ketika bangsa ini menyadari bahwa karakter yang berkembang hari ini bukanlah menunjukkan karakter bangsa kita yang luhur yang berakar dari budaya bangsa Indonesia.

Persoalan aktual kebangsaan sejak kemerdekaan NKRI adalah prihal “mengelola perbedaan”. Bukankah perbedaan adalah fitratullah dan karenanya kita menjadi plural dan multikultural? Bukankah pula dialektika perbedaan adalah lumrah dan niscayanya konflik? Konflik-konflik mendorong perkembangan masyarakat berlangsung dalam mekanisme dinamika-dialektik, yakni mekanisme dinamika sosio kultural yang ideal melalui pemberdayaan potensi *creating values* individu dalam pembangunan peradaban. Namun, patut disadari bahwa keniscayaan konflik sama pentingnya dengan keniscayaan harmoni. Konflik dan harmoni adalah dua hal yang diperlukan tetapi dalam kesetimbangan yang dinamis, dan untuk itu diperlukan kearifan manajemen konflik.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia dibangun di atas kemajemukan yang kompleks. Namun, manajemen kebangsaan dalam dua orde awal kepemimpinan negara-bangsa memperlakukan perbedaan dan

konflik sebagai ancaman. Oleh sebab itu, konflik dalam segala bentuk manifestasinya, berupa perbedaan pendapat atau pertentangan, baik secara horizontal maupun vertikal, semua dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni dan karena itu mesti diantisipasi. Kekuasaan masa itu memandang bahwa potensi konflik tidak boleh ada dan karena itu mesti dimatikan sejak dini. Semuanya diarahkan menuju suatu keseragaman. Semboyan nasionalisme “Bhinneka Tunggal Ika” seakan-akan dipahami dan harus dipahami sebagai “pluralitas yang harus dikelola sedemikian rupa menuju monolitas”. Tentu saja hal itu tidak sejalan dengan esensi kebhinnekaan Indonesia yang secara arkeologis telah memiliki akar multikulturalisme sejak 2000-2500 tahun yang lalu (Ardika, 2004:3-11), yaitu realitas faktual yang mendasari perwujudan diri sebagai negara-bangsa, realitas kemajemukan yang mendahului kehendak untuk bersatu, *kebinekaan* yang mendahului *tunggal ika* (Gonggong, 2002:164-165).

Pengelolaan pluralitas dengan cara demikian mengakibatkan dinamika multikultural Indonesia tidak berkembang secara alamiah, progresif dan produktif. Ketika keran kebebasan dan demokrasi dibuka “di bawah tekanan dan tuntutan” reformasi sejak 1998, anak bangsa ini bagaikan ayam yang lepas dari kurungan selama puluhan tahun. Di satu sisi, memang tuntutan desentralisasi, otonomi daerah, dan perimbangan keuangan pusat-daerah, yang telah disuarakan dengan lantang oleh masyarakat Minangkabau (dan beberapa daerah lain di Indonesia) pada tahun 1950-an, yang melahirkan pemberontakan PRRI (1958-1961) dan lalu ditumpas oleh Pusat secara *draconian* (keras dan kejam)(Kahin, 2005), baru mendapat perhatian pada era reformasi ini. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi realitas bahwa pada saat masyarakat dan pemerintah tertunda untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan dan dalam mengelolanya secara bijak, berbagai konflik dan fenomena disintegrasi bangsa muncul dan mengemuka di berbagai daerah. Itulah problema kebangsaan kita hari ini.

Sebagai ilustrasi mari kita cermati berbagai wacana keindonesiaan era reformasi ini, wacana kemajemukan yang

diwarnai aneka konflik anarkhis, baik horizontal maupun vertikal. Pada Januari 1999, pemerasan terhadap sopir angkot di terminal Batu Merah telah memicu konflik bernuansa SARA di Ambon, Maluku. Pada Maret 1999 juga, konflik horizontal dan komunal terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, yang dipicu pemerkosaan, penyerobotan tanah, perampasan tambang emas tradisional, dan kasus kriminal yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Pada tahun berikutnya, bulan April 2000, perkelahian anak muda di terminal meluas menjadi perkelahian antar kampung di Poso, Sulawesi Tengah. Setahun kemudian, Pebruari 2001, perkelahian antar kelompok juga terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Demikian pula di Tarakan, Kalimantan Timur, pada 26 September 2010, terjadi konflik komunal terpicu pengeroyokan. Di Jakarta tidak jauh berbeda, ibukota negara dan pusat pemerintahan yang heterogenitasnya telah terbentuk sejak lama itu juga didarai melalui konflik komunal (Hasanuddin, 2010).

Bila tren konflik sebelum 2011 cenderung bersifat komunal-horizontal, tahun 2011 dan 2012 trennya beralih ke konflik vertikal. Pada tahun 2011, tercatat 2.791 konflik agraria di Indonesia (VIVAnews.com, 10 Feb 2012). Selama tahun 2012 (dua bulan terakhir) telah terjadi 11 konflik pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Riau. Konflik agraria dalam bentuk perebutan lahan antara warga dan perusahaan perkebunan besar, di Mesuji. Lampung berdampak pada anarkhi pada akhir 2010 dan sepanjang 2011. Konflik agraria demikian terjadi antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah daerah," (<http://www.riauterkini.com>, 22 Pebruari 2012). Demikian pula konflik anarkhis di Papua dan Aceh yang ternyata mencerminkan belum harmonisnya hubungan vertikal disana dan di Indonesia.

Dalam skala lokal Sumatera Barat, misalnya, wacana konflik komunal horizontal juga muncul dalam terminologi *cakak banyak*. Pada era reformasi ini, *cakak banyak* terjadi di Kabupaten Solok, Pasaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten

Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Walaupun masih perlu diuji kesahihannya, Zubir (2005, 2010) berasumsi bahwa wacana *cakak banyak* merupakan indikator karakter budaya dan sejarah etnis Minangkabau sebagai perpanjangan dari pola perang antarkampung yang pernah berkembang pada abad XVIII dan XIX.

Bertolak belakang dari realitas faktual demikian, dalam wacana akademik digambarkan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat egalitarian yang telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu, yang ditandai dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Setelah berasimilasi dengan Islam, adat Minangkabau diperkuat dengan ajaran Islam sebagaimana terepresentasi dalam wacana *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Adat bersendikan Islam, Islam bersendikan Al Quran). Pada masyarakat egalitarian dan demokratis itu, konflik *built in*, dimotivasi oleh etos harga diri untuk selalu bersaing dengan yang lain, namun dikontrol oleh etik atau budi agar keseimbangan yang dinamis terpelihara (Nasroen, 1971; Navis, 1984; Naim, 1983). Konflik (tesis-antitesis) dan harmoni (konsensus dan sintesis) menjadi bagian dalam interaksi sosio kultural Minangkabau itu. Keduanya, konflik dan harmoni, menjadi ruh bagi kearifan lokal mereka dalam menata kehidupan sosial. Hal itu menggambarkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kearifan lokal manajemen konflik. Namun, mengapa fenomena beberapa tahun terakhir justru menunjukkan masyarakat yang *setback* dari masa lalu?

Agaknya, relevan untuk dikutipkan disini Editorial Surat Kabar Media Indonesia tanggal 30 September 2010 sebagai berikut. "Kini bangsa ini menjadi bangsa pemaarah. Kita kehilangan kemampuan bertoleransi. Kohesifitas di antara beragam etnik kian renggang dan malah bersalin dengan semangat saling membantai, saling membunuh" (Media Indonesia, 30 September 2010).

Paradigma Wacana Konflik

Hadirin yang mulia

Sebelum menganalisis wacana kearifan lokal manajemen konflik dalam budaya Minangkabau perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam orasi ini. (1) Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah gagasan-gagasan arif dan bijak yang bersifat *lokal*, yang dilandasi oleh sistem nilai yang dihayati, yaitu sesuatu yang diyakini baik dan menjadi standar perilaku bagi anggota masyarakat lokal tersebut. (2) Konflik dapat dipahami sebagai relasi tesis dengan antitesis, relasi sebuah pernyataan dengan negasi atasnya, atau sebuah eksistensi dengan respons kontradiktif terhadapnya. (3) Mediasi dalam orasi ini bukan bermakna proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (sebagaimana pengertian dalam KBBI), melainkan proses penyediaan alat atau sarana perantara bagi terfasilitasinya naluri berkonflik sebagai konsekuensi dari perbedaan dan persaingan sehingga konflik mengalami transformasi dari manifestasi potensialnya berupa kekerasan atau anarkhi ke manifestasi yang lebih elegan, etis, dan estetis. (4) Transformasi konflik dalam makalah ini dimaksudkan adalah perubahan manifestasi konflik dari anarkhi ke wujud yang lain tanpa kekerasan, bersifat konstruktif dan produktif secara intelektual; etis; atau estetis.

Wacana dan Konflik

Wacana menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah ucapan, perkataan, tutur; keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan; satuan bahasa terlengkap, realisasinya terlihat pada karangan yang utuh seperti novel, buku, atau artikel, atau pada pidato, khutbah, dsb (KBBI, 1995). Ricoeur (dalam Thompson, 2003:284-287) membedakan antara wacana yang mengacu pada teks oral (ranah semantik) dengan teks yang mengacu pada wacana tertulis (ranah hermeneutik). Teks, (bahasa sebagai *meaning*) menurut Ricoeur adalah *any discourse fixed by writing* (wacana yang difiksasikan dengan tulisan) (Ricoeur, 2002:217). Dalam perkembangannya,

pengertian keduanya menjadi tumpang tindih, sebab setiap aktivitas kebudayaan atau fenomena sosio-kultural, adalah wacana atau seringkali juga disebut teks sosial. Istilah teks dan wacana lebih sering mengemuka dalam produk komunikasi atau hasil pergulatan manusia dalam realitas kehidupan sebagai *human symbolic activity* (Purwasito, 2002:94), terutama yang berkait dengan pemakaian bahasa dalam sebuah sistem sosial (Gee, 1999).

Wacana manajemen konflik dalam orasi ini dilihat dalam perspektif kritis, yakni perspektif yang melihat penggunaan bahasa sebagai praktik sosial (Jorgensen and Phillips, 2007:285) Titik awal analisis wacana kritis adalah bahasa sebagai representasi realitas dan sekaligus kontributor bagi pengonstruksian realitas itu, berupa identitas sosial, hubungan sosial, dan sistem pengetahuan serta makna. Wacana adalah peristiwa penggunaan bahasa atau peristiwa komunikasi, yang memiliki tiga dimensi, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial (Jorgensen and Phillips, 2007:128, 285).

Sementara itu, konflik dapat dijelaskan dalam konstruksi filsafat dialektika Hegelian. Menurut Hegel, proses dialektika dan perkembangan pemikiran sangat menentukan bagi perkembangan sejarah masyarakat. Oleh karena itu, setiap konsep atau fenomena akan meyebabkan terjadinya negasi atau kontradiksi, dan akan melahirkan sintesis sebagai pemecahan terhadap kontradiksi itu. Demikian seterusnya, suatu sintesis sebagai resolusi akan menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi yang baru lagi (Smith, 1987:77).

Teori Konflik menempatkan individu sebagai agen dalam mekanisme perubahan, terutama dalam proses sintesis, melalui potensi *creating value* yang dimilikinya. Sekalipun kreatifitas individu potensial bagi terjadinya konflik, namun konflik dapat diarahkan sebagai pemelihara solidaritas, menciptakan alienasi, mengaktifkan individu yang terisolasi, dan sebagai sarana komunikasi (Soelaiman, 1998:64-66). Konflik dipandang bukan sebagai sesuatu yang disfungsional, destruktif, atau patologis, sebagaimana dipersepsikan oleh pendukung teori Struktural Fungsional. Konflik malah merupakan sesuatu yang positif dan

fungsional bagi terpeliharanya struktur sosial. Lewis A. Coser mengakui bahwa beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum struktural fungsional, tetapi dia juga menekankan adanya proses lain, yakni konflik sosial (Coser, 1975:210-219). Pada intinya, Coser menekankan bahwa konflik dan konsensus, integritas dan perpecahan, merupakan proses fundamental dan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dipahami (Polloma, 1994:80-129).

Dahrendorf (1986) juga berpendapat bahwa konflik menjadi kunci bagi struktur sosial dan fungsional bagi perkembangan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, segala usaha untuk menekan konflik tidak diperlukan, tetapi yang terpenting adalah mengaturnya melalui suatu institusionalisasi (Polloma, 1994:130-146). Namun, Galtung (2005) mengeritik kecenderungan pembicaraan konflik lebih dominan pada kekerasan dan kontrol atasnya daripada soal penyelesaian dan perdamaian, lebih tertarik pada pendekatan keamanan daripada kemampuan (*viability*), dan sangat sedikit berbicara soal pencegahan. Lebih jauh Galtung menyatakan bahwa ilmu sosial, khususnya penelitian konflik dan perdamaian, tidak bebas budaya. Setiap budaya, menurutnya, memiliki endapan-endapan pengalaman bersama perihal konflik, kekerasan, dan perdamaian (sebagai lawan dari kekerasan). Demikian pula, setiap budaya memiliki lapisan-lapisan arkeologi yang lebih dalam dari budaya, begitu dalamnya sehingga sedimen-sedimen itu tidak lagi terpantul. Untuk itu diperlukan penggalian agar mendapat sinar,

Agaknya, kearifan lokal manajemen konflik dalam budaya Minangkabau merupakan sedimen-sedimen arkeologis yang memerlukan penggalian agar bersinar kembali, sebagaimana dimaksudkan Galtung di atas. Kearifan lokal manajemen konflik Minangkabau tersebut memiliki kekhasan strategis yang berbeda dari model-model penanganan konflik yang ada selama ini, yang menekankan kepada penyelesaian (setelah konflik terjadi) atau pencegahan (dengan mematikan potensi konflik yang ada). Sebagaimana akan terlihat nanti,

kearifan lokal manajemen konflik Minangkabau mempersyaratkan mediasi (memfasilitasi konflik melalui media budaya) bagi pengaliran dan pengaluran naluri berkonflik sehingga manifestasi konflik berubah atau mengalami transformasi dari potensi anarkhi menjadi konflik yang intelek, elegan, etis, estetis, dan bermartabat tanpa kekerasan.

Representasi Wacana Konflik

Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Andalas, Ketua dan Anggota Senat FIB, dan hadirin yang saya muliakan.

Teks Konflik

Teks utama yang merupakan representasi wacana budaya Minangkabau adalah peribahasa dan petatah petiti. Oleh karena itu, dalam bahasan ini peribahasa dan pepatah petiti adalah teks yang dijadikan sebagai titik tolak dalam menjelaskan wacana konflik dalam Budaya Minangkabau.

Fungsionalisasi konflik dalam budaya Minangkabau diawali dengan penempatan individu sebagai subjek yang bebas sekaligus sebagai faktor pembeda. Sesuai dengan kearifan yang dimiliki orang Minangkabau, yang diilhami oleh falsafah *alam takambang jadi guru*, perbedaan disadari sebagai representasi hukum Allah atau secara umum dikenal sebagai “hukum alam” (*sunnatullah*), sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan: *kapalo samo hitam pandapek balain-lain; lain padang lain balalang, lain lubuak lain ikan*. Eksistensi masing-masing individu satu sama lain itu ditempatkan pada tataran sejajar dan setara, sesuai mamangan: *duduak samo randah tagak samo tinggi, duduak sahamparan tagak sapamatang*.

Individu-individu tersebut secara genealogis ditempatkan dalam kelompok-kelompok kekerabatan secara bertingkat, mulai dari kelompok *saparuik*, *sakaum*, *sasuku*, dan *sanagari*. Eksistensi masing-masing kelompok pada tiap-tiap tingkatan itu, satu sama lain, berada pada tataran yang sama dan sejajar pula. Keniscayaan dalam dinamika interaksi antar individu dan antar kelompok yang sejajar tersebut adalah persaingan

malawan dunia urang 'melawan dunia orang' sesuai etos *baa di urang baa di awak* 'bagaimana orang (mampu) begitu pula kita (semestinya)'. Dinamika persaingan adalah *kok indak ka labiah dari urang sakurang-kurangnyo adolah samo* 'jika tidak mampu melebihi orang lain, setidaknya kita mampu untuk sama dengan orang lain'. Dalam bentuk yang ekstrim malah diungkapkan begini: *jan ka kalah, podo se ndak nio* 'jangan kalah dari orang lain, sama saja tidak mau'. Apabila seseorang tidak mampu untuk sama dengan atau melebihi orang lain maka seseorang itu disebut *urang kurang*, dan prediket demikian sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu setiap individu dan kelompok dipacu untuk selalu bersaing satu sama lain secara terus menerus.

Begitu kuatnya etos bersaing dan berkonflik, kompetitor bahkan tidak mesti riil atau nyata tetapi juga bisa imajiner, sebagaimana diungkapkan dalam mamangan *bajalan surang nak dau* 'berjalan seorang hendak dahulu'. Artinya, ketika dihadapkan pada realita tidak adanya pesaing, rasionalnya tentu tidak akan ada kompetisi dan pemenang (orang yang dahulu atau di depan). Namun, seseorang tetap dituntut untuk tampil sebagai pemenang dengan cara menciptakan pesaing imajiner untuk dikalahkan.

Peribahasa di atas biasanya diikuti dengan: *bajalan baduo nak di tengah* 'berjalan berdua hendak di tengah'. Peribahasa itu sama tidak rasionalnya dengan *bajalan surang nak dau*. Namun, makna ungkapan tersebut adalah bahwa *bajalan baduo* 'berjalan berdua' adalah analogi atas dualitas tesis-antitesis. Keniscayaan dalam hubungan tesis-antitesis bukan saling meniadakan satu sama lain, tetapi yang dikehendaki adalah dialektika yang membuahkan komformitas atau terutama sintesis (*nak di tengah*). Dengan demikian, sejalan dengan filsafat konflik Hegelian, dimana ada tesis disitu diperlukan antitesis, dan daripadanya diharapkan lahir sintesis-sintesis yang ideal, demikian seterusnya sebuah sintesis akan mengundang antitesis-antitesis yang baru lagi.

Representasi wacana konflik Minangkabau yang sentral adalah sebagaimana peribahasa berikut: *basilang kayu dalam*

tungku, baitu api mako ka iduik, baitu nasi mako ka masak 'bersilang kayu dalam tungku dengan begitu maka api akan hidup, dengan begitu maka nasi akan masak'. Peribahasa tersebut memiliki makna yang lebih luas dari sekadar dialektika tesis-antitesis-sintesis, tetapi melengkapinya dengan unsur mediasi dan *output* konflik. Bila kita cermati secara struktural, peribahasa itu dapat dijelaskan sebagai berikut: *basilang kayu* adalah konflik (tesis-antitesis), *tungku* adalah media/ mediasi, *api mako ka iduik* adalah *output* berupa sintesis, dan *nasi mako ka masak* adalah *outcome* atau hasil. Dengan demikian, konflik tidak saja diperlukan tetapi juga mesti dimediasi sehingga mengalami transformasi manifestasi yang menghasilkan sintesis, *output*, dan *outcome*.

Saya tidak memasukkan peribahasa *tagak basuku mamaga suku, tagak banagari mamaga nagari, tagak babangso mamaga bangso* 'tegak bersuku memagar suku, tegak bernagari memagar nagari, tegak berbangsa memagar bangsa' sebagai wacana konflik karena sesungguhnya itu merupakan representasi pandangan adaptasi multikultural yang bersifat strukturalis, yaitu bahwa seseorang adalah makhluk global yang hidup dalam ruang-ruang berjenjang. Sebuah kesatuan suku atau *clan* merupakan sebuah keseluruhan yang terdiri atas individu-individu genealogis. Namun, dalam konteks kampung dan *nagari*, kesatuan suku atau *clan* hanyalah sebuah unsur. Demikian pula, dalam konteks berbangsa, kesatuan etnik hanyalah sebuah unsur dalam keseluruhan yang multi etnik. Pada posisi sebagai sebuah unsur, ia bersifat partikularitas terhadap keseluruhan yang dibangunnya. Demikianlah realitas berjenjang dipahami sehingga setiap individu memiliki kewajiban mengayomi diri dan kelompoknya secara proporsional berjenjang itu. Hal yang ditekankan dalam wacana tersebut adalah bahwa kepentingan bersama mesti lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok parsial (Hasanuddin, 2009).

Praktik Kewacanaan Konflik

Salah satu aspek dalam analisis praktik kewacanaan (*discourse practice*), mengacu kepada Fairclough (dalam Jorgensen and Phillips, 2007:128, 285) adalah sistem jejaring intertekstual teks. Perspektif jejaring intertekstualitas berpandangan bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri tetapi memiliki jejaring yang kompleks dan luas. Oleh sebab itu, interpretasi atas sebuah teks mesti dalam kaitan dengan jejaring teks-teks lain itu.

Salah satu teks yang relevan dan sentral untuk menjelaskan representasi wacana konflik dalam dalam peribahasa Minangkabau di atas adalah Tambo Minangkabau. Historiografi tradisional Minangkabau tersebut saat ini secara fisik dapat ditemui berupa manuskrip dan naskah tercetak. Sebagaimana dijelaskan Djamaris (1984), ada 34 naskah Tambo Minangkabau di Leiden, tiga naskah di London, dan 10 naskah di Jakarta. Tentu saja hal itu belum termasuk naskah yang ada di tangan masyarakat dan yang telah dicetak menjadi buku seperti Toeah (Tt) dan Diradjo (2009). Walaupun Mansoer et.al (1970:39) mengatakan bahwa Tambo Minangkabau itu hanya memuat 2% fakta sejarah dan selebihnya adalah mitologi, ia tetap merupakan sumber informasi kultural Minangkabau yang penting terutama dalam konteks wacana konflik.

Pada manuskrip yang berisi sejarah asal usul nenek moyang orang Minangkabau yang tidak bertarikh tersebut secara simbolis digambarkan bahwa suatu ketika datang satu rombongan orang asing yang bermaksud menaklukkan daerah yang dijumpainya. Rakyat Minangkabau dari “laras nan dua” bersiap-siap untuk bertempur mempertahankan dan membela korong kampungnya. Namun, kekerasan dapat dihindari dengan memediasinya melalui teka-teki (Toeah, tt:82-84). Pada kali berikutnya, rombongan asing yang terdiri atas prajurit-prajurit Majapahit itu datang kembali, dan konflik kekerasan juga

dimediasi dan ditransformasi melalui adu kerbau (adu kerbau ini menjadi asal usul nama wilayah dan etnik Minangkabau itu)(Toeah, tt; Djamaris, 1991; Diradjo, 2009). Begitu juga ketika kedatangan raja asing (Sang Sapurba dan Adityawarman) mereka memediasinya dengan bentuk lain yakni akomodasi kekerabatan dengan menjadikan keduanya sebagai semenda.²

Teks konflik dalam Tambo Minangkabau tersebut secara simbolis mengirim pesan bahwa sekalipun konflik merupakan sesuatu yang lumrah karena perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak, namun konflik tersebut perlu dimediasi secara cerdas sehingga anarkhi dapat dihindari. Mediasi konflik diperlukan agar manifestasi konflik lebih mencerminkan harkat manusia sebagai makhluk berakal dan intelek (mediasi teka-teki) yang berbeda dari binatang karena hanya binatang yang layak berkonflik secara anarkhis (mediasi adu kerbau). Pilihan mediasi lain yang layak dan pantas untuk manusia, sebagaimana direfleksikan Tambo Minangkabau ketika menolak konflik anarkhis, adalah silaturahmi dengan pola akomodasi kekerabatan.

Praktik Sosial Konflik

Praktik sosial dalam analisis wacana kritis mengacu pada analisis konteks sosial wacana. Dalam kaitan itu, berdasarkan uraian di atas, ada tiga bentuk mediasi konflik yang ditawarkan, yakni: mediasi konflik melalui teka teki (konflik intelektual), mediasi konflik melalui adu kerbau (konflik rekreaif), dan mediasi konflik melalui penerimaan sebagai semenda (akomodasi kekerabatan). Bentuk-bentuk mediasi konflik

² Ada beberapa episode pokok yang menggambarkan ini, yaitu: Asal usul negeri dinamai Minangkabau, peristiwa datangnya enggang dari laut (Djamaris, 1984: 80), Pulau Perca disebut alam Minangkabau, kedatangan Sang Sapurba, dan Adityawarman Datang ke Pulau Perca (Diradjo, 2009: 53-62).

tersebut dapat dijelaskan dengan realitas faktual praktik sosial masyarakat Minangkabau

Pertama, praktik sosial konflik intelektual di Minangkabau yang penting ditunjukkan melalui manuskrip-manuskrip keislaman yang ditulis pada abad ke-19. Berbeda dari manifestasi konflik penuh kekerasan yang dipresentasikan oleh Kaum Paderi dengan Kaum Adat pada paro awal abad 19, presentasi konflik antara Kaum Tua (ulama adat) dengan Kaum Muda pasca Perang Paderi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk “perang pena”, yang wujudnya berupa naskah-naskah tulisan tangan atau tercetak. “Perang pena” tersebut berisi penolakan terhadap gerakan pembaruan keislaman sebagaimana diungkapkan oleh Kaum Syatariyah melalui naskah-naskah yang ditulisnya (Fathurahman, 2005). Demikian pula penolakan terhadap sejarah, perbedaan, pertentangan, dan perdebatan-perdebatan direpresentasikan melalui penulisan naskah, seperti yang dilakukan Imam Maulana Abdul Manaf (Katkova dan Pramono, 2009, Pramono, 2009). Perdebatan dalam penentuan awal Bulan Ramadhan dan awal Bulan Syawal, polemik pemahaman ajaran keislaman dalam satu golongan penganut tarekat, dan polemik antara Kaum Tua dengan Kaum Muda juga direpresentasikan melalui penulisan naskah (Pramono, 2008a dan 2008b). Hal itu mengisyaratkan bahwa pola konflik “perang pena” merupakan sebuah mediasi bagi pengaliran konflik di antara penganut tarikat dan ajaran keislaman di Minangkabau pasca Perang Paderi.

Kedua, praktik sosial konflik rekreatif ditunjukkan melalui sastra debat dan seni pertarungan. Sastra debat adalah sastra lisan Minangkabau yang disampaikan secara dialogis yang dalam pertunjukannya menghadirkan dua atau tiga kelompok penampil, dan antar group penampil akan berdebat dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada—dan pada

gilirannya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari—kelompok penampil lain yang menjadi komptitornya. Ada dua bentuk sastra debat yang masih eksis hingga hari ini, yaitu *Salawat dulang* dan *Indang*. Keduanya sama-sama lahir di Pariaman. Akan tetapi, *Salawat Dulang* berkembang di dataran tinggi terutama di Malalo, Tanah Datar sedangkan *Indang* berkembang di tanah kelahirannya yakni Pariaman. Keberadaan kesenian tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam yang ditandai oleh kemunculan serta perkembangannya yang berpusat di *surau-surau* dengan tradisi berdebat yang melembaga sebagaimana digambarkan Suryadi (2004).

Secara keseluruhan, pertunjukan *Salawat Dulang* dan *Indang* dapat dilihat sebagai bentuk pertarungan antar *surau*, yang dalam pertemuan itu mereka saling bertanya jawab, berdebat, dan menguji kemampuan pengetahuan lawan tentang berbagai aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. Kalah-menang dalam pertunjukan sastra debat ini memiliki dampak psikologis secara kolektif, karena berkait dengan harkat dan martabat *nagari* asal penampil. Apabila satu kelompok *penampil sastra debat itu* mengalami kekalahan dalam bertanding, yang akan merasakan malu bukanlah kelompok penampil itu semata, tapi juga seluruh warga *nagari* tempat kelompok itu berasal. Untuk mengantisipasi agar nama *nagari* tetap terpandang, berbagai cara dilakukan demi memenangkan pertandingan, termasuk dengan kekuatan kebatinan atau magis untuk melemahkan kemampuan kelompok lawan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan (Sulaiman, 1990: 24). Artinya, dalam seni berkata-kata itu seseorang diajarkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri, tanpa menggunakan senjata dan kontak fisik (Suryadi, 1994).

Seni pertarungan adalah seni pertunjukan yang menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis. Termasuk kategori ini adalah *ulu ambek*. *Ulu ambek* adalah seni permainan yang mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis namun tanpa kontak fisik sehingga menyerupai pantomim persilatan. Gerakan-gerakan dilakukan mengikuti irama musik vokal *dampeang* yang dilantunkan oleh dua orang *tukang dampeang*. Pertarungan tersebut dipimpin oleh dua orang *janang* yang bertindak sebagai wasit dan diawasi oleh para *ninik mamak* atau penghulu *nagari-nagari* yang terlibat. Tempat pertunjukan adalah *laga-laga* yang berarti tempat berlaga, tempat bertarung, tempat menentukan kalah menang, tempat menyaksikan siapa pemenang dan siapa pecundang.³ (Martamin & Amir B, 1977; Muzaharuddin, 1979; Samah et.al., 1981; Hatta, 1983; dan Mukhtar, 1990; Djamaan, 1988; Kamal, 1992; Navis, 1984:268). Pätzold (2004) mengatakan bahwa *ulu ambek* adalah a 'Play of Inner Power', the Luambek forms a category of its own within the rich movement arts traditions of the Minangkabau people.

Ulu ambek lahir dan berkembang di Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau yang saat ini meliputi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Ulu ambek*

³ Dalam perkembangannya, istilah *laga-laga* diganti dengan kata *pauleh* 'pengulas' atau 'penyambung', yang dalam konteks *ulu ambek* adalah penyambung silaturrehmi. Demikian pula istilah *pai balaga* 'pergi berlaga' berganti dengan istilah '*pai baralek*' 'pergi memenuhi undangan hajatan'. Dalam perubahan terminologi itu tercermin perubahan wacana dalam *ulu ambek*, yaitu dari pertarungan menjadi persahabatan atau konflik menjadi silaturrehmi. Esensinya adalah wacana manajemen konflik.

dipertunjukkan pada suatu *alek nagari*⁴ Dalam seni konflik tersebut dipertemukan dua orang dari dua komunitas (perguruan silat atau *nagari*) berbeda sehingga konflik relatif sangat aktual. Aktualitas konflik tersebut dikuatkan oleh alasan pertarungan harga diri masing-masing komunitas komunal (perguruan silat atau *nagari*) di samping resiko malu—juga secara komunal—apabila dalam pertarungan tersebut satu pihak mengalami *buluih* atau kalah. Kekalahan dalam *ulu ambek* tersebut adalah keadaan dipermalukan di hadapan umum dan karena itu sangat "melukai" hati petarung dan komunitasnya. Oleh sebab itu, seni konflik adalah sekaligus seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif.

Pertunjukan tersebut tidak bisa diselenggarakan tanpa seizin *ninik mamak* atau *penghulu* sebagai pemilik (karena *ulu ambek* adalah *suntiang* 'mahkota' mereka) dan apabila tanpa *janang*. Permohonan izin *ninik mamak* untuk bolehnya *ulu ambek* dipertunjukkan disebut dalam istilah *basalang* 'bersalang/ berpinjam'. Hal itu dilakukan oleh *kapalo mudo* 'kepala pemuda' dalam suatu *pasambahan* sebelum permainan. Di samping itu, permainan tersebut dilangsungkan dalam pengawasan *pangulu* dari kedua belah pihak yang bertarung dan dipimpin oleh dua orang *janang*. *Janang* dituntut untuk mampu bersikap tegas dan adil. Oleh karena itu kepada *janang* dibacakan *sumpah sati* 'sumpah sakti' bahwa "apabila tidak bersikap adil maka akan dimakan sumpah, yakni: jika berbudidaya pertanian di sawah padinya akan hampa, jika beternak ternaknya kurus-kurus, dan jika istrinya melahirkan maka anaknya lahir tanpa paha sebelah" (Hasanuddin, 2010).

⁴ *Alek nagari* adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Alek nagari diadakan dalam rangka peresmian penobatan penghulu baru atau momentum adat yang penting lainnya.

Ulu ambek, dengan demikian, merupakan mediasi konflik antar perguruan silat atau antar *nagari* yang ada di Padang Pariaman. Melalui *ulu ambek*, naluri berkonflik disalurkan, dialirkan, dialurkan, dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung secara estetik tanpa kontak fisik dan terhindar dari efek anarkhi yang sangat potensial terjadi setelah pertunjukan karena salah satu pihak *buluih* atau kalah dan dipermalukan, sebagaimana terjadi pada tahun 1930 (Hasanuddin, 2010a, 2010b, 2011).⁵

Ketiga, mediasi konflik melalui akomodasi kekerabatan adalah *malakok*. *Malakok* merupakan suatu media bagi penerimaan 'pendatang', baik etnik Minangkabau maupun non Minangkabau, secara prorangan atau kelompok, untuk bisa masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau di luar *nagari* atau kampung asalnya, baik ke dalam struktur kesukuan yang telah ada maupun dengan membentuk suku baru. Dengan

⁵ Pada 1930-an pernah terjadi konflik *cakak balolong* antara *nagari* Mangguang dengan Mudiak Padang setelah pertunjukan *ulu ambek* (Martamin (1977). *Cakak balolong* saat itu, menurut Imran (1977) bukanlah terpicu sesaat melainkan merupakan perpanjangan dari dendam kesumat akibat *buluih-buluih* dalam pertunjukan sebelumnya. Oleh sebab itu, sejak saat itu, permainan *ulu ambek* dijaga ketat agar tidak sampai berakhir dengan *buluih*. Pada saat itu, menurut Bakaruddin Zay (Wawancara 18 Sep 2010) *ulu ambek* nyaris dilarang, tetapi karena keberadaannya dipandang sangat penting maka ia diambil alih oleh *ninik mamak*. Itu sebabnya *ulu ambek* diklaim sebagai *sunting ninik mamak* atau *sunting pangulu*. Sebagai *sunting* atau mahkota *ulu ambek* hanya boleh dimainkan atas seizin *ninik mamak* atau *pangulu* dan pelaksanaannya dijaga ketat agar tidak menimbulkan sengketa. Motivasi *mambuluihkan* 'mempermalukan' lawan dalam permainan itu juga dihilangkan. Pihak yang menunjukkan motivasi demikian akan dikucilkan. Pengucilan ternyata mampu memberi efek jera sehingga aturan itu cukup efektif dalam menjaga harmoni di antara *nagari-nagari* persekutuan *ulu ambek* (Hasanuddin dan Awwali, 2010: 48-49).

malakok, seseorang memperoleh hak-hak yang nyaris sama seperti anggota suku lainnya, seperti diberi sebidang tanah untuk mendirikan rumah dan sebagai modal penghidupannya, atau dicarikan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemahirannya (Yakub, 1995:35). Di samping itu, hak utama yang penting, sebagaimana dirasakan oleh etnik non Minangkabau, adalah hak perlindungan dan kenyamanan dari perlakuan anarkhi dan diskriminasi oleh kelompok lain.

Dengan demikian, *malakok* merupakan bentuk aktual mediasi konflik. *Malakok* merupakan institusi yang disediakan oleh budaya Minangkabau untuk memediasi (1) pendatang beretnik Minangkabau agar bisa masuk ke dalam struktur suku/ *clan* yang ada dalam suatu *nagari* di luar *nagari* asalnya, (2) pendatang non Minangkabau agar bisa masuk ke dalam struktur suku/ *clan* yang ada dalam suatu *nagari* di Minangkabau atau untuk disepakati membentuk suatu suku/ *clan* tersendiri apabila pendatang tersebut merupakan sebuah kelompok komunitas, (3) pendatang agar tidak memperoleh perlakuan diskriminatif dan anarkhis di tempat domisili yang baru, (4) dua keluarga yang terlibat masalah sensitif seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Dengan demikian, esensi *malakok* adalah mediasi bagi potensi diskriminasi dan konflik yang anarkhis. Oleh karena itu, *malakok* berfungsi mewujudkan integrasi dan harmoni sosial (Simulie, 2004:10, Amir M.S., 2004:67; Navis, 1984:128; Syamsir, 2000; Eriyanti, 2004; Saptomo, 2004:7; Hasanuddin 2010, 2011).

Dengan mengakomodasi seseorang pendatang ke dalam suatu lembaga kekerabatan maka seseorang itu telah memiliki basis komunal untuk dapat diajak "duduk sama rendah tegak sama tinggi" dalam berbagai persoalan. Basis komunal sangat diperlukan agar perlakuan diskriminasi terhadap pendatang dapat diantisipasi.

Refleksi Mediasi Transformasi Konflik

Hadirin yang mulia,

Mustahil representasi budaya konflik lahir dalam kekosongan sosial konflik. Dengan kata lain, keempat bentuk representasi budaya konflik di atas, yakni manuskrip konflik, sastra debat, seni pertarungan, dan tradisi akomodasi kekerabatan, tidak akan pernah ada di Minangkabau apabila realitas konflik itu tidak pernah ada pada masyarakat bersangkutan. Representasi budaya tersebut merefleksikan realitas sosio kultural dan kearifan local (*local wisdom*) masyarakat Minangkabau, yaitu masyarakat egalitarian, demokratis, dan dinamika sosio kulturalnya berlangsung secara dialektis.

Pada keempat bentuk representasi wacana budaya di atas terdapat refleksi transformasi konflik sebagai berikut. **Pertama**, pada konflik yang digambarkan dalam manuskrip historiografi tradisional Tambo Minangkabau, konflik yang pada mulanya sangat berpotensi terekspresi melalui anarkhi, yaitu perang antara penduduk Minangkabau dengan tentara asing yang datang hendak menaklukkan mereka, dimediasi dengan adu kecerdasan melalui teka-teki, adu kerbau, dan akomodasi kekerabatan. Dalam konteks demikian, potensi dan naluri berkonflik tidak dimatikan, tetapi dimediasi secara arif dan bijaksana sehingga konflik tetap mengalir tetapi dengan alur yang berbeda sehingga konflik mengalami transformasi dari manifestasi yang nyaris anarkhi menjadi konflik yang cerdas dan intelek (teka-teki), konflik rekreatif (adu kerbau), dan potensi tragedi kemanusiaan menjadi ikatan persahabatan bahkan kekerabatan.

Kedua, debat adalah representasi konflik, terutama dalam tataran ide, pemikiran, dan pemahaman atas suatu pengetahuan atau ajaran. Perdebatan pertama-tama diekspresikan secara aktual pada *surau-surau* yang melibatkan

santri-santri dari berbagai perguruan atau pesantren tradisional Minangkabau, sebagaimana digambarkan oleh Suryadi (2004). Sementara perdebatan-perdebatan aktual tetap dilembagakan di *surau-surau* atau lembaga-lembaga tradisional seperti *balai adat*, ternyata tradisi berdebat pun dimediasi dengan tulisan dan kesenian.

Penulisan naskah atau manuskrip keislaman merupakan mediasi konflik ide, pemikiran, dan pemahaman atas pengetahuan atau ajaran dimaksud, khususnya ajaran keislaman. Dengan kata lain, perbedaan pemahaman atas ajaran diekspresikan melalui tulisan, sehingga potensi konflik anarkhis sebagaimana telah terbukti pada era sebelumnya dalam bentuk perang saudara antara Kaum Adat dengan Kaum Paderi yang memuara menjadi Perang Paderi (1821-1837) setelah kolonialis Belanda turut campur, dimediasi melalui penulisan sehingga anarkhi mengalami transformasi menjadi “perang pena” atau konflik yang cerdas dan intelek yang melahirkan *output* akademik berupa buku atau manuskrip.

Debat juga dimediasi dengan kesenian. Substansi ide dan pemikiran dituangkan ke dalam bentuk teks syair dan kemudian dipresentasikan melalui pertunjukan sastra debat *Indang* dan *Salawat Dulang*. Dalam konteks itu, mediasi kesenian menjadi jembatan bagi transformasi konflik aktual intelektual menjadi konflik dengan manifestasi estetis.

Ketiga, konflik anarkhi antar *nagari*, sebagaimana digambarkan Radjab (1970:16) juga mengungkapkan bahwa di Minangkabau persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga peperangan, terjadi tidak saja antar *suku (clan)* dalam suatu kesatuan teritorial *nagari*, melainkan juga antar *nagari-nagari* yang berdekatan. Konflik-konflik anarkhis demikian kemudian mereka mediasi dengan seni *ulu ambek* sehingga

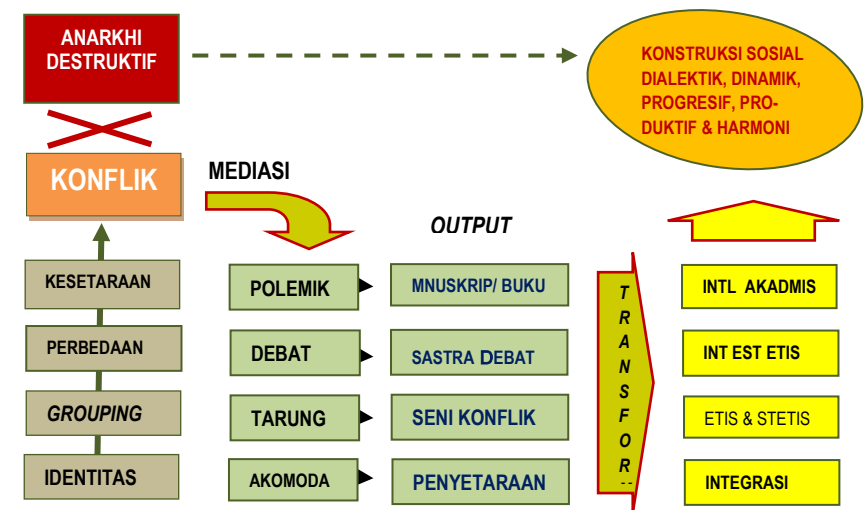
manifestasi anarkhi dari konflik mengalami transformasi menjadi konflik yang estetis sekaligus etis.

Estetika konflik pada kesenian ini sejalan dengan prinsip bahwa tolok ukur keindahan itu adalah pada “ketersiratan” ekspresi, sebagaimana kiasan dalam bahasa. Ekspresi tersirat dalam seni *ulu ambek* adalah pada pertarungan tanpa kontak fisik. Manifestasi estetika konflik mestilah estetis dan metaforis sehingga tidak “buka kulit tampak isi” melainkan simbolik. Karena itu, konflik dalam *ulu ambek* tidak vulgar dan frontal, sebagaimana pertarungan silat, tinju, gulat, atau olahraga bela diri yang mempertontonkan pertarungan aktual. Walaupun demikian, ketiadaan kontak fisik bukan berarti bahwa kalah-menang menjadi kehilangan arti tetapi justru kadangkala memiliki dampak psikologis lebih dalam daripada kalah bertarung dengan kontak fisik langsung. Nilai estetika seni ini tentu lebih tinggi dibanding seni bela diri pencak silat atau seni perang yang fisik. Nilai etis dalam seni ini ditunjukkan melalui tata krama interaksi antar kelompok/ nagari/ perguruan dan aturan-aturan ketat yang diberlakukan untuk mengawal agar permainan yang riskan anarkhis itu terkelola dengan baik dan harmonis.

Keempat, adat akomodasi kekerabatan *malakok* merupakan mediasi bagi para pendatang di suatu teritorial otonom *nagari* untuk mendapatkan akses sosio kultural pada wilayah dan komunitas masyarakat setempat. Pada banyak kasus, pendatang yang enggan membaur ke dalam struktur masyarakat setempat sering mendapatkan gangguan keamanan dan perlakuan diskriminatif. Hal itu terjadi karena di samping pendatang merupakan perorangan atau kelompok yang marginal ia juga tidak memiliki basis komunal untuk bisa berinteraksi secara sejajar dengan masyarakat setempat yang hidup dengan struktur sosial berkelompok-kelompok menurut

clan atau kaum. Oleh sebab itu, *malakok* merupakan mediasi perbedaan yang mentransformasikan potensi perlakuan diskriminatif dan anarkhis menjadi interaksi yang dinamis dan harmonis. *Malakok*, dengan demikian, merupakan ‘kearifan lokal’ (*local wisdom*) dalam mewujudkan keharmonisan hubungan antara etnik pendatang dengan etnik tuan rumah atau antar suku atau antar kaum di kawasan Minangkabau Sumatera Barat.

Model mediasi transformasi konflik sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini.



Model Mediasi Transformasi Konflik Minangkabau
HasanuddiN, 2010

Model di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Fitrah hidup manusia adalah berbeda. Perbedaan dibentuk oleh kekhasan individual seseorang dan kelompok yang membedakannya

dengan individu dan kelompok yang lain. Kekhasan dan perbedaan tersebut disadari oleh individu dan kelompok itu dan diakui oleh individu dan kelompok yang lain. **Itulah identitas.** Identitas dan pengelompokan (*grouping*) dalam perbedaan ditempatkan pada tataran setara dan sejajar, meniscayakan persaingan dan konflik. Konflik, bila dibiarkan akan memuara pada anarkhi. Oleh karena itu, konflik harus dimediasi secara arif sehingga melahirkan produk kultural kreatif. Konflik pemikiran dimediasi melalui polemik tertulis sehingga membuahkan manuskrip atau buku (konflik intelektual akademis). Konflik pemikiran itu juga dapat dimediasi melalui perdebatan lisan dengan produk seni sastra debat (konflik intelektual dan estetis). Konflik fisik dimediasi melalui pertarungan tetapi dimenej sedemikian rupa dengan kawalan normatif yang dikonstruksi secara konvensional bersama sehingga membuahkan seni pertunjukan (konflik etis dan estetis). Potensi konflik akibat perbedaan eksternal yang menempatkan individu atau kelompok pada tataran yang tidak setara dan sejajar, maka akomodasi sosial ke dalam kelompok-kelompok yang ada merupakan mediasi bagi terciptanya integrasi sosial. Dengan kata lain, perbedaan dan kesetaraan menjadi prasyarat bagi peniscayaan konflik, dan konflik niscaya dimenej dengan mediasi. Dengan kearifan dan kreatifitas mediatif demikian maka konflik mengalami transformasi menjadi konstruktif secara dialektik, progresif, dinamik, dan harmonik.

Simpulan dan Rekomendasi

Hadirin yang mulia.

Urian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Persoalan kebangsaan dalam bingkai NKRI hingga saat ini adalah perihal mengelola perbedaan dalam kemajemukan atau kebinekaan yang menjadi dasar pembentukan NKRI itu.

Persoalannya adalah bahwa perbedaan dan kemajemukan selama ini dipahami dan diperlakukan sebagai ancaman bukan kekayaan. Paralel dengan itu, pemahaman terhadap konflik (sebagai representasi dari perbedaan dan kemajemukan), juga senantiasa dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan destruktif. Padahal, konflik merupakan sesuatu yang lumrah bahkan niscaya bagi dinamika sosio kultural,

Konflik pada masyarakat Minangkabau adalah *built in*. Hal itu terepresentasi pada wacana budaya mereka, terutama dalam peribahasa, historiografi tradisional, manuskrip, sastra debat, seni pertarungan, dan tradisi akomodasi kekerabatan. Namun, konflik tidak dibiarkan mengalir ke dalam bentuk anarkhi, tetapi dimediasi sehingga konflik bertransformasi dari manifestasi anarkhi ke manifestasi yang beradab: intelek, estetis, etis, produktif dan karena itu ia positif dan konstruktif. Semua itu menunjukkan bahwa Minangkabau memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) manajemen konflik yang cerdas.

Walaupun demikian, kearifan lokal tersebut mengalami dekadensi nilai, penyurutan fungsi dan peran sosial strategis, serta terancam punah. Akibatnya, berbagai fenomena sosial akhir-akhir ini ditandai oleh maraknya konflik anarkhis yang mengakibatkan sendi-sendi kehidupan yang plural dan multikultural di Indonesia menjadi terancam goyah pula. Oleh sebab itu diperlukan tindakan revitalisasi atas kearifan lokal demikian, yang meliputi tindakan diseminasi model, rekonstruksi, re-institusionalisasi, dan produksi budaya kreatif.

Demi terlaksananya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal mediasi transformasi konflik di Sumatera Barat, ada beberapa faktor determinan yang patut diperhitungkan, yaitu: sistem matrilineal termasuk sistem perkawinan (eksogami), otonomi kewilayahan, pemegang otoritas, karakteristik masyarakat, faktor historis, serta kesadaran identitas dan etnisitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. (2004). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Ardika, I Wayan. 2004. "Bukti-Bukti Arkeologi Terbentuknya Akar Multikulturalisme", dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (Ed.) *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.
- Coser, Lewis A. 1975. "*Structure and Conflict*". Dalam Peter M. Blau (ed.): *Approach to Study of Social Structure*. New York: The free Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Suatu Analisis Kritik*. Edisi Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Djamaan. 1988. "Musik *Dampeang* di Desa Tarok, Kapalo Hilalang." Padang Panjang: Laporan Penyelidikan, ASKI Padang Panjang.
- Djamaris, Edwar. 1991. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Eriyanti, Fitri. (2004). "Integrasi Sosial Suku Bangsa Batak Mandailing Dengan Minangkabau di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Batang Anai." (Thesis Magister). Universitas Negeri Padang. Padang.
- Fathurahman, Oman. 2005. "Naskah dan Rekonstruksi Sejarah Lokal Islam: Contoh Kasus dari Minangkabau" *Jurnal Wacana* (Vol. 7 No. 2 Oktober, hlm. 141-148).
- Galtung, Johan. 2005. "Mencari Solusi yang Ampuh Bagi Konflik, Beberapa Tema yang Hilang" Dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (Eds.) *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta.
- Gee, James Paul. 1999. *An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method*. London: Roudledge.
- Gonggong, Anhar. 2002. *Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan*. Jogjakarta: Komunitas Ombak.
- Hasanuddin. 2009. "Wacana Identitas Etnik Minangkabau di Bali" (Disertasi). Denpasar: Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Hasanuddin. 2010. "Wacana Manajemen Konflik dalam *Ulu Ambek* di Padang Pariaman" *Jurnal SALINGKA, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra*. Padang: Balai Bahasa (vol.7, No.2, Hal 137-151).
- Hasanuddin dan Muchlis Awwali. 2010. "Penggalian dan Revitalisasi Kearifan Lokal bagi Mediasi dan Resolusi Konflik di Sumatera Barat" (Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun-I). Jakarta: DP2M Ditjen Dikti
- Hasanuddin, 2011. *Kearifan Lokal dan Mediasi Transformasi Konflik di Sumatera Barat*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Hatta, Bakar, et al. 1983. "Tari *Luambek* di Kecamatan 2 X 11 VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman" (Laporan Penyelidikan). Padang Panjang: ASKI.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana, Teori dan Metode* (Imam Suyitno, Lilik Suyitno, dan Suwarna, Pentj.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

- Kamal. 1992. "Analisis Musik Vokal *Dampeang Luambek* di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat" (Skripsi). Medan: Jurusan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.
- Katkova, Irina & Pramono. 2009. *Sufi Saint of Sumatra: Awliya' Sumatra*. SPb : Academy of Culture's Research.
- Mansoer, M.D. et all. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara.
- Martamin, Mardjani. dan Amir. B. 1977. "*Luambek*: Salah Satu Contoh Pengumpulan Data Folklore". Padang: Jurusan Sejarah FPIPS-IKIP Padang.
- Mukhtar. 1990. "Tari *Ulu ambek* dalam Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Kepala Hilalang". Padang Panjang: Latihan Ilmiah Sarjana ASKI.
- Muzaharuddin. 1979. "Hubungan Tari *Luambek* dengan Adat di Daerah Pesisir Pariaman" Padang Panjang: Latihan Ilmiah Sarjana Muda ASKI.
- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau Dalam Dialektika Kebudayaan Nusan-tara". Dalam A. A. Navis (ed.): *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Politik*. Padang: Genta Singgalang.
- Nasroen, M. 1971. *Dasar-dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bu-lan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Pätzold, Uwe Umberto. 2004. "When the 'Dampeang' is over, the 'Luambek' is over, Sound as a Determinant of Structure within a Competition of Inner Power based on Movement in West Sumatra" on The XXIII Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology", Monghidoro, Italy, 13th July 2004 (http://www.pandeka.com/Ulu_ambek_song_from_Pariaman_regency).
- Polloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramono. 2008a. "Fenomena Jual Beli Naskah dan Upaya Penyelamatan Naskah Melayu-Minangkabau," Padang: Fak. Sastra Univ. Andalas
- Pramono. 2008b. "Menulis Untuk Mendebat: Telaah Teks dan Konteks Naskah Risalah Mizan al-Qalb untuk Bahan Pertimbangan bagi Kaum Muslimin Buat Beramal Ibadah Kepada Allah Karya Imam Maulana Abdul Manaf Amin al-Khatib". *WACANA*, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya. Juli
- Pramono. 2009. "Inventarisasi, Katalogisasi dan Digitalisasi Naskah di Sumatera Barat, Riau dan Kepri," Padang: Lemlit Unand.
- Purwasito A. 2002. *Imajiner India Studi Tanda dalam Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Radjab, Mohamad. 1964. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)* Jakarta: Balai Pustaka
- Ricoeur, Paul. 2002. *Filsafat Wacana Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Terj. Musnur Hery. Yogyakarta: IRCiSod.
- Ricoeur, Paul. 2002. *Teori Penafsiran Wacana dan Makna Tambah..* Terj. Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Samah, Arby et.al. 1981. "Tari Ulu Ambek di Kabupaten Padang Pariaman". Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, Proyek Pengembangan Kesenian Sumatera Barat.
- Saptomo, Ade. (2004). Potensi Lokal Dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam. <http://www.huma.or.id>

- Simulie, Kamardi Rais Dt. P. (2004). Status Tanah Ulayat dan Potensinya. *Padang Ekspres*, 17 Maret 2004 halaman 10.
- Smith, Charlottter. 1987. *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: Macmillan Press Ltd.
- Soelaiman, M. Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogya-karta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Syafruddin. 1990. "Sastra Lisan Indang di Minangkabau". The Toyota Foundation.
- Suryadi, 1994. "Indang sebagai Seni Bersilat Lidah di Minangkabau" *Jurnal Seni*. Yogyakarta: Intitut Seni Indonesia (No. IV/03/1994).
- Suryadi, 2004. *Syair Sunur, Teks dan Konteks 'Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19'*. Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Syamsir. (2000). Hubungan Sosial Orang Minang dan Orang Nias di Kodya Padang. (Tesis Master, Tidak Diterbitkan). PPS UNPAD Bandung.
- Thompson, John B. 2003. *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (Haqqul Yaqin, Pentj.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Toeah, H. Datoek. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Yakub, Dt. Nurdin. (1995). *Hukum kekerabatan Minangkabau*. Jakarta: CV. Pustaka Indonesia.
- Zubir, Zaiyardam. 2005. "Bacakak Banyak : Studi Tentang Perang Antar Kampung di Sumatera Barat." Jakarta : Penelitian Fundamental Dikti
- Zubir, Zaiyardam. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan, Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Insist Press

VIVAnews.com, 10 Feb 2012

<http://www.riauterkini.com>, 22 Pebruari 2012).

Media Indonesia, 30 Sept 2010).

BIODATA SINGKAT

Hasanuddin, lahir di Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 17 Maret 1968. Pendidikan SD sampai MTsN (1975-1984) dijalani di Kapalo Hilalang, kemudian MAN di Kotobaru Padang Panjang (1984-1987). Sarjana Sastra Minangkabau diperoleh di Universitas Andalas (1992), Magister (1999) dan Doktor Kajian Budaya (2009) diperoleh di Universitas Udayana Bali. Dosen (2003) yang Mantan Ketua Jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas (periode 2003-2006) dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Fakultas Sastra Universitas Andalas (2010) ini sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Andalas (2010-2014). Alamat sekarang di Jl. Mangga I/ 171 Perumnas Belimbing, Kuranji-Padang, HP 081338062385, email: hasanuddin@fsastra.unand.ac.id, hasanuddin17@gmail.com.